

RESOLUSI KONFLIK KEPERCAYAAN DALAM TOLERANSI BERAGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Oleh:

Andi Muhammad Arief Malleleang¹⁾, I Gede Sumertha KY²⁾,
Puguh Santoso³⁾, Herlina Juni Risma Saragih⁴⁾

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: andiariefm@gmail.com

²email: gedesu16@yahoo.co.id

³email: puguh28838@yahoo.com

⁴email: herlinasara897@gmail.com

Abstrak

Menjadi masyarakat multikultural merupakan suatu tantangan bagi Indonesia. Beragamnya budaya dan keyakinan kian menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik Kepercayaan kerap kali menjadi permasalahan, terlebih konflik agama. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Dari segi agama, Indonesia mengenal beberapa agama, yaitu Islam, Katolik Roma, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda. Kurangnya tatanan sosial untuk mengelola dengan baik perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa konflik antar agama bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian. Penanganan konflik sosial seperti ini harus didasari dengan penanaman nilai-nilai toleransi antar umat beragama pada masyarakat multi-kultural. Resolusi konflik kepercayaan dalam toleransi beragama dapat dilakukan dengan internalisasi Pendidikan, mencegah politik identitas pada demokrasi dan pemimpin yang inklusif dalam merajut nilai multikultural di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data maupun literatur terkait resolusi konflik kepercayaan pada masyarakat multikultural di Indonesia.

Kata Kunci: Resolusi Konflik Kepercayaan, Toleransi Beragama, Multi-Kultural

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang lahir dengan memiliki keberagaman budaya dan kepercayaan yang terhimpun sebagai masyarakat multikultural. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mempresentasikan bermacam-macamnya kebudayaan yang ada di Negeri ini. Tetapi hal tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan nilai-nilai toleransi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyat agar dapat terhindar dari ancaman maupun konflik sosial seperti konflik kepercayaan.

Konflik kepercayaan berkaitan erat dengan konflik sosial. Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali dikonotasikan secara negatif. Terlepas dari asumsi yang muncul hanya sebagai hipotesis dalam menganalisis fenomena sosial, tetap saja keberadaan konflik merupakan entitas yang memilukan bagi individu yang menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Bahkan para ahli konflik juga mengakui hal ini.

Konflik sosial berpotensi terjadi dalam masyarakat multi-agama, terutama dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah terjadinya *human error* dalam memahami teks-teks agama. Beberapa teks agama dimaknai secara “sembarangan” tanpa mempertimbangkan aspek

sejarah, psikologi, sosial, budaya, dan kondisi situasional keadaan sekitar. Sehingga berpotensi menimbulkan intoleransi terkait perbedaan ras, budaya, dan agama (Ferdinand et al., 2018).

Hal ini kemudian membuat seluruh lapisan masyarakat, khususnya ilmuwan sosial, bekerja ekstra keras untuk mencari dan mengusulkan solusi. Salah satu solusi yang saat ini sedang dibahas adalah penanaman nilai-nilai toleransi dan pendidikan multikultural. Gerakan wacana dan dialog antar pemeluk agama mengalami kemajuan yang signifikan. Berawal dari kesadaran bahwa semua umat beragama pada dasarnya mengejar perdamaian, kasih sayang, dan cinta serta hidup bahagia dengan orang yang mereka cintai. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, diperlukan sikap saling menghormati dan pelaksanaan yang seimbang antara hak dan kewajiban antar anggota masyarakat untuk mencegah akar intoleransi sehingga menjelma menjadi konflik.

Misalnya, pada pagelaran Moto GP Maret 2022 lalu, terdapat aksi seorang pawang hujan oleh Rara Istiani Wulandari yang akrab disapa Mba Rara. Ritual yang dilakukan oleh Mba Rara banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia, apalagi saat ini topik tersebut sedang trending #1 di media sosial. Menurut beberapa pihak, ritual tersebut justru memberikan kesan negatif bagi Indonesia, karena

Indonesia baru saja menjadi tuan rumah pada agenda bergengsi tersebut. Sementara yang lain percaya bahwa tindakan pawang hujan mewakili Indonesia yang berbeda keyakinannya sesuai dengan budaya dominan di masing-masing daerah.

Fenomena tersebut merupakan satu dari beberapa konflik kepercayaan yang terjadi di Indonesia. Menjadi masyarakat multikultural dapat menjadi nilai tambah untuk Indonesia, sebab dapat memberi poin keberagaman dalam kehidupan bernegara maupun beragama sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Tetapi, disisi lain Multikultural juga dapat menjadi bumerang pada ketentraman masyarakat. Terdapat potensi kultural yang lebih dominan akan menguasai kultural yang dinilai lebih sedikit pada suatu daerah. Dinding antara kaum minoritas dan kaum mayoritas akan selalu menjadi persoalan hangat.

Kepercayaan dan toleransi orang Indonesia satu sama lain adalah komponen penting dari keragaman negara. Bendera merah putih sebagai bendera nasional Indonesia menggambarkan merah sebagai keberanian dan putih sebagai wujud kesucian masyarakat maupun Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merangkum konsep ini, yang meskipun beragam, tetap merupakan organisme yang bersatu. Toleransi dapat menjadi kunci utama dalam menjadi sumber daya yang paling penting untuk mencapai harmoni terhadap masyarakat yang pluralistik. Dengan mengadopsi perspektif ini, maka mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghapus perilaku intoleran. Banyak kejadian baru-baru ini diperburuk oleh kurangnya informasi, terutama tentang konsep-konsep penting toleransi, yang meliputi demokrasi, humanisme, dan pluralisme.

Melihat fenomena konflik kepercayaan yang terjadi, diperlukan suatu studi maupun formula dalam penyelesaian konflik toleransi beragama dalam masyarakat Multikultural Indonesia yang didasari oleh analisis teori resolusi konflik untuk memahami dinamika konflik kepercayaan pada masyarakat multikultural di Indonesia demi menumbuhkan pendidikan toleransi sebagai resolusi penyelesaian konflik.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini berargumen akan pentingnya penyelesaian masalah sosial melalui pemajuan cita-cita toleransi dalam masyarakat multikultural yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode berbasis filosofi untuk mengkaji keadaan objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013).

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Laporan penelitian, e-book, buku perpustakaan, jurnal, majalah, dan sumber elektronik (internet) semuanya digunakan untuk mengumpulkan

informasi untuk penelitian penulis, yang meliputi pengumpulan data dan pemilihan sumber. Wawancara juga digunakan untuk melengkapi pengumpulan data dan memberikan informasi tentang topik diskusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teori Resolusi Konflik

Pada panduan dasar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konflik sebagai pertengkaran, perselisihan, dan pertikaian, namun dalam arti kata lainnya, konflik juga didefinisikan sebagai ketegangan atau kontradiksi dalam cerita atau drama fiktif (kontradiksi antara dua kekuatan, konflik dalam satu karakter, konflik), antara dua karakter, dan seterusnya). Konflik juga didefinisikan sebagai berikut oleh Lewis A. Coser:

"Conflict within and between groups in a society can prevent accommodations and habitual relations from progressively impoverishing creativity. The clash of values and interests, the tension between what is and what some groups feel ought to be, the conflict between vested interests and new strata and groups demanding their share of power, wealth, and status, have been productive of vitality"(Coser, 1957).

Menurut definisi di atas, konflik adalah perjuangan dan usaha atas tuntutan dan nilai untuk memperoleh kekuasaan, status, dan sumber daya tertentu, dengan tuntutan atau nilai yang dimaksudkan untuk merugikan, menetralkan, atau menghancurkan pihak lawan. Konflik mengacu pada ketidaksepakatan tentang bagaimana mencapai tujuan tertentu, yang disertai dengan nilai-nilai yang harus ditangani oleh kelompok atau individu tertentu.

Sebelum menerapkan strategi resolusi konflik, perlu dipahami bagaimana proses konflik dimulai. Johan Galtung berpendapat dalam hal ini konflik atau ketidaksepakatan sering diproyeksikan sebagai segitiga ABC, yaitu aksi, perilaku serta kontradiksi. Ketiga aspek saling memiliki keterkaitan yang kuat, dan salah satu dari mereka dapat menjadi katalisator bagi perkembangan konflik. Misalnya, ketidakselarasan tujuan regional dapat mengakibatkan konflik. Kemudian pada bagian perilaku adalah sikap saat bertikai antara pihak satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan respons emosional dan menghasilkan pengembangan tujuan yang berbeda sehingga menghasilkan dinamika konflik (Galtung, 2007).

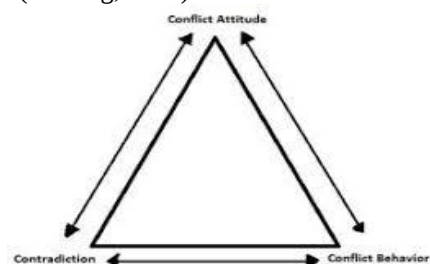


Figure 1. Segitiga ABC Johan Galtung

Untuk memulai, perlu untuk mengenali bahwa proposisi yang tampaknya langsung bahwa konflik dapat dimulai pada salah satu dari tiga poin (tetapi harus melibatkan ketiganya) menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan apa sikap, perilaku, dan kontradiksi itu dan bagaimana ketiga komponen ini benar-benar berhubungan satu sama lain. Segitiga ABC adalah model terbaik untuk pemula maupun ahli untuk digunakan ketika mencoba memahami konflik karena membuatnya lebih mudah untuk memahami kontradiksi yang mendasarinya, sikap aktor terhadap satu sama lain, dan perilaku yang dihasilkan dari kontradiksi dan sikap konflik. Karena analisis mungkin dimulai dengan satu masalah, penulis dapat memastikan apa yang mendasari konflik dan bagaimana hal itu dapat dideskripsikan.

Teori ini didasarkan pada kepemilikan fasilitas produksi sebagai sumber utama pembagian kelas sosial. Teori konflik adalah kebalikan dari teori struktural-fungsional, yang mengutamakan tatanan sosial. Teori konflik mengkaji konflik dan manifestasinya dalam sistem sosial. Menurut teori konflik, masyarakat tidak akan selalu tertib. Setiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Teori konflik kemudian mengakui adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Teori ini berusaha untuk memahami sumber pelanggaran aturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menantang. Konflik di sini menunjukkan sifat pluralistik masyarakat dan distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara berbagai kelompok; karena kekuasaannya, kelompok elit juga dapat membuat peraturan, terutama yang menguntungkan kepentingan mereka.

Konflik muncul karena adanya perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Karakteristik fisik, kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, dan kepercayaan hanyalah beberapa perbedaan. Karena adanya karakteristik individu dalam interaksi sosial, konflik merupakan kejadian yang wajar dalam setiap masyarakat, tidak ada masyarakat yang pernah bebas dari konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik ini akan berhenti ada hanya ketika masyarakat itu sendiri tidak ada lagi.

Dalam ilmu sosiologi, teori fungsional oleh varian pemikiran Parsons, dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya realitas alam konflik dalam realitas sosial. Seperti yang dijelaskan Turner, David Lockwood juga menjelaskan poin ini, menyatakan bahwa perspektif Parsons yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial menghasilkan permusuhan konseptual di dunia sosial (Turner, 1975).

Pemikiran Parsons tentang keseimbangan sosial didasarkan pada beberapa prinsip teoretis mendasar. Pada tataran metateori, pemikiran Parsons, menurut Giddens dan Turner, adalah integrasi metodologi ideografis, tipe ideal, nomologis, dan

konstruktivis (Giddens & Turner, 2015). Cita-cita model integrasi teoretis Parsons, sampai taraf tertentu, bertentangan dengan keberadaan Marx. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat adalah hasil dari revolusi pribadi. Fakta ini menguatkan pernyataan Nisbet dalam Ekeh bahwa reaksi yang cukup mendesak terhadap realitas individualistik Eropa terjadi pada abad kesembilan belas. Sosiolog Eropa umumnya percaya bahwa subjek pengetahuan yang dapat diterapkan pertanyaan tentang kepentingan ketertiban dimulai dengan runtuhnya rezim lama dan semangat revolusioner revolusi demokratik. Perubahan radikal yang terjadi adalah lahirnya gerakan revolusi industri Perancis.

Penyelesaian konflik didasarkan pada manifestasi kontradiktif di bidang sosial pada tingkat yang paling mendasar. Dalam pandangan Martono, Kontradiksi adalah fakta sentral dari segala sesuatu yang ada. Kontradiksi ini menghasilkan rumusan hukum dialektika. Menurut hukum disiplin, kontradiksi melekat dalam segala hal, baik di alam maupun dalam kehidupan manusia. Hukum dialektika, yang mengatur pembangunan masyarakat, terdiri dari tiga komponen: tesis, antitesis, dan sintesis. (Martono, 2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia"

Pasal tersebut juga mengatur bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Setiap orang tunduk pada pembatasan hukum ketika menjalankan hak dan kebebasan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hal kegiatan keagamaan, negara menjamin hak individu untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya.

Dinamika Konflik Kepercayaan Pada Masyarakat Multikultural di Indonesia

Kehidupan manusia selalu penuh dengan konflik, yang dapat berkisar dari etnis hingga agama. Beberapa diantaranya berlangsung lama, misalnya konflik antara Islam dan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib adalah perang terbesar dalam sejarah Muslim dan Kristen. Permusuhan antara penganut kedua agama ini seringkali dilatarbelakangi oleh peristiwa sejarah. Terlepas dari perbedaan dengan partai-partai sebelumnya, Paus Urbanus II melancarkan Perang Salib pada 1095, mengirimkan pasukan besar untuk mendirikan kerajaan Latin di Tanah Suci dan mendukung kaum Muslim sebagai kekuatan politik dan militer.

Kekuatan sangat penting. Setiap saat, cukup besar untuk Muslim dan Kristen (Yunus, 2014).

Pluralisme yang melahirkan perbedaan, menambah dimensi unik dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan harus dipandang sebagai aset yang mampu mengubah Indonesia menjadi negara besar. Di antara perbedaannya adalah kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Tentang agama, Nasution dalam Syihab (2010) memberikan daftar definisi agama sebagai berikut:

- a. Mengenali kondisi manusia yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang harus dihadapi.
- b. Pengakuan adanya entitas supernatural yang berkuasa atas manusia.
- c. Berkomitmen pada cara hidup yang mencakup pengakuan terhadap sumber yang tidak bergantung pada diri manusia dan tindakan manusia.
- d. Kepercayaan pada kekuatan supranatural mengakibatkan mengadopsi cara hidup tertentu.
- e. Kode etik yang diumumkan oleh kekuatan supernatural.
- f. Penerimaan kewajiban yang dianggap berasal dari entitas supernatural.
- g. Manusia mengelilingi diri mereka dengan pemujaan kekuatan supernatural karena sentimen kelemahan dan ketakutan mereka terhadap kekuatan misterius.
- h. Wahyu Tuhan kepada manusia melalui Rasul

Agama dan kepercayaan memiliki arti yang berbeda tetapi sering digunakan secara bergantian. Faktanya adalah bahwa suatu agama selalu didasarkan pada keyakinan terhadap ajaran agama. Darraz (2010) mengidentifikasi lima elemen penting yang membedakan agama/keyakinan dari perilaku yang mungkin atau tidak dianggap religius:

- a. Dalam agama, pemurnian dilakukan pada Dhat yang memiliki sifat unik, seperti tidak terlihat dan tidak terlihat oleh indera.
- b. Dalam agama, dhat gaib bukanlah bagian dari alam semesta ini, tetapi memiliki daya, pengaruh, dan kekuatan positif sesuai dengan kehendak dan iradah.
- c. Meskipun kekuatan tidak melekat pada alam, ia memiliki hubungan yang berarti dengan alam dan manusia. Ia mendengar semua doa dan keluhan manusia, memperhatikan kesedihan dan harapan manusia, dan dapat memberikan maupun menjawab doa terhadap harapan manusia sesuai dengan kehendaknya.
- d. Agama-agama percaya bahwa kekuasaan tertinggi dan tersuci itu ada, bahwa ia maha kuasa dan tidak dapat dikendalikan, bahwa ia tidak tunduk pada siapa pun dan segala sesuatu.
- e. Dalam agama, ketundukan diartikan sebagai kesediaan dan kesadaran untuk bersujud dan menyembah apa yang diyakini secara bebas.

Agama menuntut ketaatan dari pemeluknya, dan tentunya setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menjadi baik. Artinya, meskipun ada

keberagaman agama di negeri ini, menjadi pemeluk agama tertentu tidak serta merta membuat seseorang menjadi sombong dan egois, tanpa memandang agama lain, karena tidak ada agama yang mengajarkan hal seperti itu. Beberapa faktor yang menjadi penyebab persatuan Indonesia adalah manifestasi dari heterogenitas ekonomi, budaya, dan agama.

Rakyat Indonesia telah mencapai tingkat tertentu persatuan antar umat agama dalam beberapa tahun terakhir. Islam, sebagai agama resmi mayoritas Indonesia, juga telah membantu dalam pembentukan kesatuan budaya. Namun, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pola dasar nenek moyang Indonesia bertumpu pada kepercayaan dan mistik pada zaman dahulu yang memberikan konteks sama untuk pengalaman keagamaan, termasuk daerah-daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam. Selain itu, pengaruh Hindu dan Budha di luar Bali, pengaruhnya masih terlihat jelas dalam kehidupan budaya dan agama Jawa. Kepercayaan Islam, seperti yang dipraktikkan di kerajaan-kerajaan pesisir Jawa Tengah memasukkan banyak unsur Hindu dan animisme. Agama sinkretis kadang-kadang disebut secara khusus sebagai agama Jawa (Wertheim, 1999).

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Dari segi agama, Indonesia mengenal beberapa agama, yaitu Islam, Katolik Roma, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama ini memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda. Kurangnya tatanan sosial untuk mengelola dengan baik perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa konflik antar agama bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian (Ulya & Anshori, 2016).

Konflik yang saling bertentangan akan semakin menjadi tantangan, terutama bagi Pemerintah maupun tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Terlebih di era yang semakin modern, dan juga ditambah dengan masuknya era *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) World*, dimana perubahan serasa semakin cepat meluas, sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat tidak dapat diatur dengan maksimal. Selain itu, kehidupan teknologi semakin menjadikan beban yang tidak menentu untuk masyarakat multikultural.

Kemudian, pemerintah maupun masyarakat semakin rumit ketika dihadapkan dengan persoalan dinamis disebabkan permasalahan yang begitu kompleks. Hal ini menjadikan keambiguan informasi yang bersifat fana dan mengambang begitu saja. Masyarakat multikultural terutama akan semakin sulit memilah informasi yang diberikan terhadap isu-isu sensitif pada media sosial.

Era VUCA World membuat dinamika pada masyarakat terkait konflik antar agama terus terjadi,

pada tahun 2021 lalu, konflik warga terkait rumah ibadah bermunculan saat natal. Tercatat setidaknya telah terjadi tiga kejadian yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Di Tulang Bawang contohnya, sekelompok warga bergerombol untuk mengunjungi gereja yang dibuka untuk Ibadah Natal. Warga tersebut beranggapan bahwa gereja tersebut belum mendapatkan izin, padahal perijinan pembangunan tempat ibadah tersebut belum selesai. Selain itu, di Jambi juga terjadi konflik agama dimana umat kristiani terpaksa beribadah diluar gereja karena rumah ibadah mereka belum mendapatkan izin resmi. Sehingga ketika hujan turun, mereka kesusahan untuk menjalani ibadah dengan khusus. Sementara di Lakarsantri Surabaya, sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah kristiani, Gereja GKI Citraland, meskipun RT setempat sudah menyatakan tidak keberatan dengan proyek ini (Fahlevi, 2021).

Menanggapi kejadian-kejadian konflik agama, perlulah ditanam nilai-nilai toleransi agama. Dalam memahami toleransi beragama, perlu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang tepat. Untuk artikel ini telah dikutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pelaksanaannya serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah dan para pemuka agama berusaha menjunjung tinggi toleransi beragama untuk menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis antar umat beragama. Bahkan, masih sering terjadi konflik dan perselisihan yang menggunakan “label agama”, seperti saling curiga antara Muslim dan Kristen serta agama lain, yang cukup membuktikan kegagalan para pendukung perdamaian.

Indonesia merupakan negara yang majemuk baik dari segi sosial, budaya, suku, ras, sektarian, dan agama, serta dari segi politik maupun ekonomi. Akibat dari ciri-ciri inilah masyarakat Indonesia digambarkan sebagai masyarakat multikultural. Menghadapi keadaan tersebut, bangsa Indonesia harus mampu merekonstruksi budaya nasional yang dapat menjadi kekuatan pengintegrasi keberagaman dan heterogenitas sosial budaya, khususnya dalam kehidupan beragama (Prasetyawati, 2017).

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan bahwa keragaman pola dalam masyarakat Indonesia dimaksudkan untuk mencerminkan tidak hanya keragaman etnis tetapi juga keragaman budaya. Saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar budaya menunjukkan adanya keragaman budaya ini. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita

berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila (Prasetyawati, 2017).

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang beragam secara etnis, bahasa, agama, dan budaya. Menurut Ekstrand, masyarakat multikultural adalah masyarakat di mana dua atau lebih elemen yang berbeda hidup berdampingan tanpa membentuk satu kesatuan politik. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sosial, komunitas, atau kelompok yang secara budaya, ekonomi, dan politik berbeda (terisolasi), memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, dan secara institusional juga berbeda satu sama lainnya (Suradi, 2018).

Rujukan utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah multikulturalisme, yaitu pandangan yang menghargai dan mengakui keragaman dalam satu kesatuan, baik secara individu maupun secara kultural. Ketika toleransi dan keinginan untuk saling menghormati dipupuk, multikulturalisme dapat tumbuh subur.

Upaya mewujudkan Indonesia yang multikultural hanya akan berhasil jika konsep multikulturalisme dipahami sebagai keharusan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup. Kedua, adanya pemahaman bersama tentang apa arti multikulturalisme bagi kehidupan bangsa. Ketiga, multikulturalisme adalah studi yang mencakup berbagai isu, termasuk politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja, bisnis, hak budaya, dan prinsip-prinsip etika maupun moral (Prasetyawati, 2017).

Multikulturalisme bukan hanya sebuah titik diskusi, melainkan juga ideologi yang harus dipertahankan. Sangat diperlukan sebagai landasan untuk menegakkan demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat majemuk. Multikulturalisme bukanlah ideologi yang berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan konsep lain untuk dijadikan sebagai lensa untuk melihat kehidupan sosial.

Van Den Berghe mengklasifikasikan masyarakat multikultural menurut enam karakteristik:

- a. Terjadinya segmentasi kelompok sosial. Diversifikasi dalam suatu komunitas dapat menyebabkan orang membentuk kelompok yang berbeda berdasarkan identitas bersama dalam menghasilkan pembentukan subkultur yang berbeda. Di pulau Kalimantan misalnya, terdapat suku Melayu, Kutai, Banjar, dan Dayak yang masing-masing memiliki budaya maupun tradisi tersendiri.
- b. Pembagian struktur sosial menjadi institusi yang saling eksklusif. Komunitas yang beragam menyebabkan struktur sosial menunjukkan perbedaan antar komunitas. Perbedaan struktur masyarakat terlihat dari tidak adanya pranata sosial yang saling melengkapi. Misalnya, lembaga

- keagamaan di Indonesia yang menaungi perwakilan beberapa agama memiliki struktur yang unik. Lembaga-lembaga keagamaan tersebut tidak saling melengkapi karena perbedaan karakteristik masyarakat (agama) yang berbeda.
- c. Adanya kelangkaan mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama). Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma yang berbeda-beda, kemudian diwujudkan dalam perilaku mereka. Hal ini karena karakteristik masyarakat yang beragam disesuaikan dengan lingkungan dan sosialnya. Kesepakatan bersama sangat sulit untuk dikembangkan karena keragaman keadaan masyarakat.
 - d. Konflik terjadi secara cukup teratur. Kesenjangan dalam masyarakat menjadi sumber pertengkaran. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antarpribadi hingga konflik kelompok. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk saling bertoleransi, baik antar individu maupun kelompok.
 - e. Integrasi sosial tumbuh secara relatif sebagai akibat dari paksaan ekonomi dan saling ketergantungan. Integrasi sosial sangat mungkin terjadi dalam masyarakat multikultural yang terkoordinasi dengan baik. Akan tetapi, integrasi sosial terjadi dalam masyarakat bukan sebagai akibat dari kesadaran, tetapi sebagai akibat paksaan dari luar terhadap diri sendiri atau kelompok. Selain itu, masyarakat bergantung pada sektor ekonomi, yang dapat mendorong integrasi sebagai hasil dari kebutuhan mereka. Contohnya adalah individu yang bekerja untuk individu atau perusahaan lain untuk memastikan bahwa dia mengikuti semua aturan yang ditetapkan.
 - f. Adanya hegemoni politik. Dalam masyarakat multikultural, kelompok tertentu dapat menggunakan kekuatan politik atas orang lain. Hal ini mengakibatkan suatu bentuk dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok non-politik (Banton, 1983).

Keanekaragaman sosial budaya adalah definisi masyarakat multikultural. Hal ini ditunjukkan dengan adanya banyak budaya yang berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri yang dapat dibedakan dari yang lain. Multikulturalisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai keberagaman dalam suatu masyarakat berdasarkan kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda latar belakang etnis, gender, dan agama. Sejak dahulu kala, setiap agama telah mengajarkan nilai-nilai menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, apapun perbedaan yang ada di muka bumi ini.

Dengan demikian, dinamika pada masyarakat multikulturalisme mencakup berbagai konsep, antara lain demokrasi, keadilan, hukum, nilai etos budaya, kebersamaan dalam menghadapi persamaan, budaya

etnis, keyakinan agama, dan hak budaya masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural sangatlah kompleks, terlebih menghadapi era VUCA world yang semakin menjadi ancaman bagi Indonesia apabila tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam menanggapi dinamika Konflik Kepercayaan Pada Masyarakat Multikultural di Indonesia.

Menumbuhkan Pendidikan Toleransi Sebagai Resolusi Konflik

Terjadinya konflik sosial yang mengatasnamakan agama bukanlah ajaran agama, karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk toleran dan menghargai orang lain. Umat beragama pada umumnya diharapkan mampu mengembangkan tradisi wacana keagamaan yang toleran terhadap keberadaan agama lain dan mampu menghadirkan wacana keagamaan yang toleran dan transformatif (Madjid, 2001).

Keberagaman etnis di Indonesia adalah kekuatan dan sumber daya selama kita tetap berakar pada perwujudan Wawasan Nusantara sebagai perspektif sosial dan budaya yang holistik. Keragaman gaya dan keragaman budaya adalah aset tak ternilai yang berkontribusi pada pengembangan kepribadian kita dan daya tarik bangsa di panggung internasional. Indonesia harus melestarikan keragaman gaya dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Setiap konflik, sekecil apa pun, akan merugikan bangsa. Fakta ini menunjukkan sifat kritis dari keragaman etnis yang diwujudkan sebagai aset nasional. Kesalahpahaman tentang hubungan antara identitas etnis, ekspresi budaya, dan kontrol sumber daya, terutama dalam lingkungan sosial yang heterogen, berpotensi memperburuk ketegangan etnis. Upaya pencegahan konflik, seperti pendidikan multikultural sangatlah diperlukan.

Apabila mengacu pada konflik kepercayaan di Indonesia dan juga menghubungkan dengan segitiga ABC oleh Johan Galtung, maka dapat dijabarkan bahwa seluruh komponen mengarah terhadap pertikaian. Aksi dilakukan oleh masyarakat antar budaya, dimana kaum mayoritas ingin menguasai kaum minoritas. Kemudian untuk perilaku oleh masyarakat di Indonesia ditandai dengan adanya asumsi secara cepat meluas di sosial media yang menjadikan konflik ini semakin meningkat serta memanaskan pada kepercayaan tertentu. Pada tahapan akhir yaitu kontradiksi menjadikan kesalahpahaman serta ketidakcocokan untuk hidup bersama, tentu perbedaan pendapat inilah yang menjadikan isu konflik kepercayaan melesat jauh. Dari pernyataan tersebut, tentu dibutuhkannya pendidikan toleransi beragama pada masyarakat multikultural untuk mencapai perdamaian positif bagi kesatuan negara Indonesia.

Multikulturalisme adalah istilah yang mengacu pada sebuah konsep, paradigma, dan

pengalaman tentang bagaimana keragaman dimaknai. Meskipun multikulturalisme memiliki banyak interpretasi, pemahaman normatif tentang bagaimana kita melihat perbedaan dan bekerja sama untuk bertahan hidup merupakan isu kritis yang dibahas dan tersebar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kita semua harus hidup dan mengalami apa artinya menjadi beragam dalam masyarakat. Sayangnya, makna positif hidup dalam keberagaman tidak tersebar luas seperti pengetahuan normatif kolektif (Wahid, 2009).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jerome C. Glenn, dkk (2009), disebutkan bahwa elemen Ekonomi Masa Depan untuk Meningkatkan Kondisi masyarakat. Dalam arti kata lain, dalam kehidupan multikultural. kemajemukan merupakan suatu nilai tambah terhadap peningkatan kualitas, baik secara ekonomi maupun sosial. Maka dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam multikultural, tentu saja dibutuhkan penanaman nilai melalui pendidikan.

Bahkan pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2050 cukup banyak orang memahami bahwa keragaman etnis adalah keunggulan komparatif dalam ekonomi masyarakat global dan telah membuat dunia kita jauh lebih damai saat ini daripada di masa lalu. Pandangan yang beragam dari banyak budaya memberikan wawasan untuk mengelola dunia yang semakin kompleks dan nilai-nilai etis bersama mempromosikan kerja sama dan stabilitas (Glenn et al., 2009).

Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap pertumbuhan keragaman penduduk sekolah yang menuntut persamaan hak bagi semua kelompok. Pendidikan multikultural dimulai dengan pengembangan konsep dan kesadaran multikultural. Ini terkait dengan peristiwa politik dan sosial saat ini. Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah dengan alasan mengagungkan keragaman dan mempromosikan pluralisme budaya sebagai cara hidup.

Penjelasan di atas merupakan argumentasi yang kuat bagi perkembangan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 UUD 1945, "setiap warga negara berhak atas pendidikan". Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), menetapkan empat pilar pendidikan pada masa ini, besok, dan seterusnya: (1) belajar untuk mengetahui, (2) belajar untuk melakukan, (3) belajar untuk menjadi, dan (4) belajar untuk hidup bersama.

Empat pilar tersebut, dengan *learning to know*, UNESCO menekankan pentingnya anak memperoleh pengetahuan yang benar sebanyak mungkin. Arah pilar kedua pada kemampuan bertindak dan bekerja didefinisikan sebagai "belajar melakukan". Pengetahuan yang luas harus

dimanfaatkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan baik. Belajar menjadi berarti mengembangkan sikap toleransi atau perasaan terhadap orang lain. Belajar untuk hidup berdampingan sangat penting bagi individu untuk belajar bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain atau bersosialisasi dalam komunitas mereka. Memahami peran diri sendiri dan peran orang lain dalam kelompok belajar diperlukan untuk bersosialisasi di masyarakat (*learning to live together*).

Bila diterapkan dengan benar, keempat pilar tersebut telah sesuai dengan apa yang dicapai pada masa kemerdekaan, yaitu pemersatuan bangsa Indonesia melalui proses pembentukan bangsa dan karakter sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti saling menghormati, keterbukaan, saling memberi dan menerima harus dibudayakan di sekolah. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pemahaman antar ras, etnis, dan agama. Pendidikan di sekolah juga harus menumbuhkan *soft skill* siswa, mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan orang lain di masa depan. Memang, mereka diajarkan untuk peka terhadap suka dan duka orang lain.

Selain itu, perlunya untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dengan menggunakan konsep Trihayu yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu *Mengayu hayuning saliro* (bahagiakan diri sendiri), *Memayu hayuning bongso* (membahagiakan bangsa), dan *Memayu hayuning menungso* (membahagiakan manusia pada umumnya). Dalam hidup ini, kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya tentang kita tetapi juga tentang komunitas maupun seluruh kemajemukan budaya yang ada di Indonesia. Konsep kebahagiaan yang pertama adalah mensyukuri setiap nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha secara positif untuk mencapai suatu tujuan dalam kesejahteraan. Selain itu, kebahagiaan bangsa dalam hubungannya dengan sesama, serta kebahagiaan manusia yang lebih luas pada umumnya, di mana pun mereka berada. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, mereka menerima kebahagiaan tertinggi. Seseorang yang berkarakter baik tidak hanya akan mempertimbangkan kesejahteraannya tetapi juga kesejahteraan orang lain dengan menjunjung tinggi nilai toleransi (Wijayanti, 2018).

Pendidikan multikultural merupakan mata pelajaran baru dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap gejala dan masalah sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap gejala dan masalah sosial yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, sosial, dan budaya dalam masyarakat.

Studi yang dibawa oleh Zamroni (2011) menegaskan bahwa pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, sekolah

harus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran multikulturalisme di kalangan siswa. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa mengembangkan sikap yang lebih menerima orang lain dengan mengajari mereka tentang pentingnya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, kebijakan, regulasi, dan model pembelajaran harus dipertimbangkan semuanya. Kurikulum sekolah harus dirancang untuk mempromosikan toleransi dan meminimalkan penghinaan terhadap kelompok etnis, agama, sosial, dan budaya. Sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, peserta didik berkesempatan untuk merayakan hari besar keagamaan dan memperingati hari-hari penting menurut keyakinan agamanya. Nilai dasar pendidikan didasarkan pada toleransi bagi orang-orang dari budaya yang berbeda. Toleransi seorang siswa harus diajarkan dan mendarah daging di dalamnya. Memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sebagai sarana untuk mempromosikan pluralisme dan memerangi segala bentuk diskriminasi.

Isu mengenai pendidikan multikultural di Indonesia menjadi topik menarik untuk dibahas maupun dikembangkan. Dalam konteks pendidikan nonformal, sekolah merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjawab persoalan menjaga kerukunan dalam roda kehidupan yang multikultural. Dalam konteks pendidikan formal di semua tingkat sekolah, penelitian tambahan diperlukan, mirip dengan bagaimana Amerika mengubah kurikulumnya atau menemukan solusi lain.

Keberanian mengajak masyarakat untuk mempelajari atau memahami keragaman agama sangat diperlukan untuk keberhasilan mewujudkan cita-cita luhur perdamaian abadi dan persaudaraan antar umat yang pada kenyataannya berbeda agama dan keyakinan. Penanaman nilai-nilai toleransi merupakan konsep yang agung dan mulia yang merupakan bagian integral dari ajaran semua agama, termasuk Islam. Toleransi antar umat beragama sangat penting bagi fungsi masyarakat sehari-hari. Toleransi berfungsi sebagai penjaga, pelindung, pembawa damai, dan pemersatu dalam komunikasi maupun interaksi, memastikan kelestarian lingkungan serta pengembangan hubungan positif antar anggota masyarakat (Suradi et al., 2020).

Toleransi diterapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dinamis, yaitu kesadaran akan hidup berdampingan secara damai dan serasi di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesinambungan Bhinneka Tunggal Ika dan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan dalam masyarakat.

Toleransi adalah sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan kerja

sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, secara etnis, bahasa, budaya, politik, atau agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk Islam. Agama yang telah memasuki masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama dapat memiliki banyak versi, terutama dalam aspek implementasinya.

Dalam mengimplementasikan Pendidikan untuk masyarakat multikultural di Indonesia juga dibutuhkan tiga hal yang memiliki keterkaitan guna meredam resolusi konflik di Indonesia. Pertama adalah internalisasi pendidikan. Internalisasi adalah proses mendalam untuk menghayati nilai-nilai yang dipelajari siswa beserta nilai-nilai pendidikan secara utuh, dengan tujuan untuk mengintegrasikannya ke dalam kepribadian siswa sehingga tercipta satu karakter atau karakter bagi siswa. Kedua, pencegahan politik identitas pada demokrasi. Secara nasional, peningkatan tingkat pendidikan pemilih merupakan salah satu pendekatan untuk mengantisipasi pengaruh buruk politik identitas; mayoritas pemilih adalah lulusan SD-SMP, yang signifikan mengingat konsekuensinya terhadap literasi sosial dan politik. Kebangsaan yang komprehensif dan non-selektif dalam hal pendirian, dan publik yang memahami operasi teknologi saat ini dan mampu memverifikasi banyak informasi yang tersebar. Ketiga adalah pemimpin yang inklusif. Kata kepemimpinan inklusif mengacu pada posisi seseorang atau individu yang menjalankan tugas yang telah ditetapkan, tetapi sebagai proses kolektif yang ada pada setiap individu atau yang mewakilinya. Pemimpin yang inklusif akan dapat merajut nilai-nilai multikultural pada suatu negara yang dipimpinnya serta dapat menyinkronisasi kemajemukan yang mengikat pada bangsa.

Nilai toleransi dalam masyarakat multikultural tercermin dari sikap saling menghormati antara mayoritas dan minoritas. Misalnya, Muslim dan non-Muslim menjaga kerukunan dan kedamaian di mana tempat ibadah mereka terletak berdekatan satu sama lain.

Untuk membangun hubungan yang toleran dan berbudaya dalam masyarakat multikultural, setidaknya diperlukan empat hal sebagai berikut:

Pertama, re-formulasi budaya dan re-interpretasi doktrin agama ortodoks dijadikan alasan untuk menjadi eksklusif dan komprehensif. Re-formulasi dan re-interpretasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga budaya dan agama tidak hanya menerima kearifan tradisi lokal tetapi juga menjadi garda depan untuk mewujudkan demokrasi yang tertanam dalam masyarakat multikultural.

Kedua, dialog antara tradisi dan agama dengan ide-ide modern. Saat ini, masyarakat memasuki fase sejarah baru dimana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban besar yang tidak bertumpu pada tradisi dan agama, seperti

budaya Barat modern. Kita tidak bisa menghindari ide dan teori sekuler, dan ini bersinggungan dengan ide-ide non-agama yang merupakan tugas paling menantang yang dihadapi umat Islam di zaman modern.

Ketiga, agama yang menekankan ajaran cinta kasih mendorong manusia untuk saling menghormati, mencintai, dan membantu melalui lembaganya masing-masing, yang biasanya diungkapkan melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Keempat, agama secara tidak langsung mendorong berkembangnya masyarakat majemuk di muka bumi melalui ajaran-ajaran tersebut (Haba, 2008).

Konsep toleransi terhadap masyarakat multikultural tergolong multikulturalisme yang akomodatif, sebagaimana dikemukakan oleh Parekh Azra, yaitu masyarakat pluralistik yang memiliki budaya dominan, yang mengakomodasi kebutuhan tertentu akan budaya minoritas. Maka hal-hal inilah yang kemudian dapat menjadi modal awal dalam penanaman nilai toleransi sebagai resolusi konflik.

Maka, dalam menumbuhkan pendidikan toleransi dalam rangka resolusi konflik kepercayaan di Indonesia, perlu adanya penjiwaan terhadap ajaran-ajaran para leluhur terdahulu seperti yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara mengenai konsep Trihahyu. Selain itu, penanaman nilai toleransi juga perlu untuk diberi kepada masyarakat Indonesia. Sikap saling menghormati antara mayoritas dan minoritas merupakan contoh nilai toleransi dalam masyarakat multikultural yang perlu dilestarikan.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Multikultural yang ada di Indonesia tentu saja menjadi kelebihan serta kekurangan disaat yang bersamaan. Terjadinya konflik sosial seringkali dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik yang dibawa individu dalam ranah masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan mulia perdamaian abadi serta pencegahan konflik sosial di antara orang-orang yang pada kenyataannya memang berbeda agama dan budaya, juga saling menghormati dan bekerja sama di antara berbagai kelompok orang, etnis, bahasa, budaya, politik, atau agama. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari pondasi negara kita. Toleransi berfungsi sebagai penjaga, pengayom, pembawa damai, dan pemersatu dalam komunikasi dan interaksi sehingga terwujud hubungan yang baik antar anggota masyarakat.

Dinamika masyarakat multikultural mencakup berbagai konsep, antara lain demokrasi, keadilan, hukum, etos budaya, kebersamaan dalam menghadapi ketimpangan, budaya etnis, keyakinan agama, dan hak budaya masyarakat. Kesulitan-kesulitan yang melekat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural sangatlah kompleks, terlebih lagi mengingat era dunia VUCA yang semakin mengancam Indonesia jika tidak

mampu beradaptasi dengan dinamika Konflik Kepercayaan dalam Komunitas Multikultural di Indonesia. Indonesia.

Untuk membudayakan pendidikan toleransi dalam konteks penyelesaian konflik agama di Indonesia, diperlukan inspirasi dari ajaran nenek moyang kita, seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep Trihahyu. Selain itu, masyarakat Indonesia harus diajarkan nilai toleransi. Saling menghormati antara mayoritas dan minoritas merupakan contoh nilai toleransi yang harus dilestarikan dalam masyarakat multikultural. Maka resolusi konflik kepercayaan dalam toleransi beragama dapat dilakukan dengan internalisasi Pendidikan, mencegah politik identitas pada demokrasi dan pemimpin yang inklusif dalam merajut nilai multikultural di Indonesia.

Pendidikan multikultural digunakan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang keragaman budaya, hak asasi manusia, dan pengurangan atau penghapusan bias atau prasangka yang menghambat kemajuan masyarakat yang adil dan terbuka. Pendidikan multikultural diajarkan, disosialisasikan, dan ditanamkan kepada peserta didik dan masyarakat di Indonesia dengan tujuan meminimalkan dan mencegah konflik antar kelompok. Setiap lembaga pendidikan harus menjadikan pendidikan multikultural sebagai prioritas karena diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi konflik.

5. REFERENSI

- Banton, M. (1983). *Racial and Ethnic Competition*. Cambridge University Press.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197–207. <https://doi.org/10.2307/586859>
- Fahlevi, F. (2021). *Konflik Warga soal Rumah Ibadah Muncul Saat Natal, Menteri Agama Prihatin*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/29/konflik-warga-soal-rumah-ibadah-muncul-saat-natal-menteri-agama-prihatin>
- Ferdi Ferdian, Afrizal, & Elfitra. (2018). Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 4(2), 136–147.
- Galtung, J. (2007). *Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation - the TRANSCEND Approach (in) Handbook of peace and conflict studies* (J. Webel, Charles ; Galtung (ed.)). Routledge.
- Giddens, A., & Turner, J. (2015). *Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial (Social Theory Today)* (Y. Santoso (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Glenn, J. C., Gordon, T. J., & Florescu, E. (2009).

- 2009 *State of the Future (The Millennium Project)* (1st ed.). The Millennium Project.
- Haba, J. (2008). Revitalisasi Sikap Toleransi: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. In I. Abdullah (Ed.), *Agama dan Sikap toleransi dalam Tantangan Global*. Pustaka Pelajar.
- Madjid, N. (2001). *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keagamaan*. Kompas Nusantara.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, H. (2010). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (1st ed.). University of Indonesia Press.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultural Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia. *Jurnal Tapis*, 1(2), 32–48.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta.
- Suradi, A. (2018). The Challenges of Education Based on Multicultural in National Local Culture Conservation in Globalization Era. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v16i1.1156>
- Suradi, A., Kenedi, J., & Surahman, B. (2020). Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 229–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p06>
- Turner, J. H. (1975). *The Structure of Sociological Theory*. Illinois: The Dorsey Pers.
- Ulya, I., & Anshori, A. A. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 20–35. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam Ekspansi Negara Islam Transnasional di Indonesia* (1st ed.). Desantara Utama Media.
- Wertheim, W. F. (1999). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. (1st ed.). Tiara Wacana.
- Wijayanti, D. (2018). Character Education Designed By Ki Hadjar Dewantara. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 10(2), 85. <https://doi.org/10.17509/eh.v10i2.10865>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia Journal*, 16(2), 217–228. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/4930/3255>
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (1st ed.). Gavin

Kalam Utama.